



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Sumtcrs Barat)**

SKRIPSI



**SRI YULIA RAHMI
7955004**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Penaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)**”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi inspirasi dan suri tauladan yang baik bagi umat islam di dunia.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Firdaus, SE, M.Si, Akt , selaku pembimbing yang telah telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si. Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Reguler Mandiri Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Yuskar, SE. MA. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
4. Bapak Drs. Fauzi Saad, Ak dan Ibu Dra. Warnida, MM, Ak selaku tim penguji.

5. **Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Reguler Mandiri yang telah memberikan materi kuliah sampai akhir semester sebagai bekal penulis di masa depan.**
6. **Bapak Helmi, Koko serta seluruh karyawan biro akademik yang telah memberikan kemudahan dalam birokrasi.**
7. **Papa (alm) dan Ibu tersayang atas pengorbanan yang tak terhingga.**
8. **Uni Ning dan D'andi terimakasih atas dukunagan dan semangatnya.**
9. **Buat Papa n Atha "Luv U Both"**
10. **Teman- teman Jurusan Akuntansi '07**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belumlah sempurna. Untuk itu kritikan dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan penulis sendiri serta pembaca semua.

Padang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Belanja Daerah atau Pengeluaran Daerah (<i>Local Expenditure</i>)	7
2.1.1 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	7
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	14
2.4 Flypaper Effect.....	17
2.5 Review Penelitian Terdahulu	18
2.6 Hipotesis	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Variabel dan Definisi Operasional	21
3.2 Data dan Metode Pengumpulan Data	21
3.2.1 Data Umum	22
3.2.2 Data Khusus.....	22
3.3 Populasi Penelitian	23
3.4 Metode Penelitian.....	23
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	23
3.4.2 Alat Analisis Statistik.....	26

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif.....	29
4.2 Uji Asumsi Klasi	31
4.3 Analisis Hasil Regresi.....	34
4.4 Pengujian Terhadap <i>Flypaper Effect</i>	39

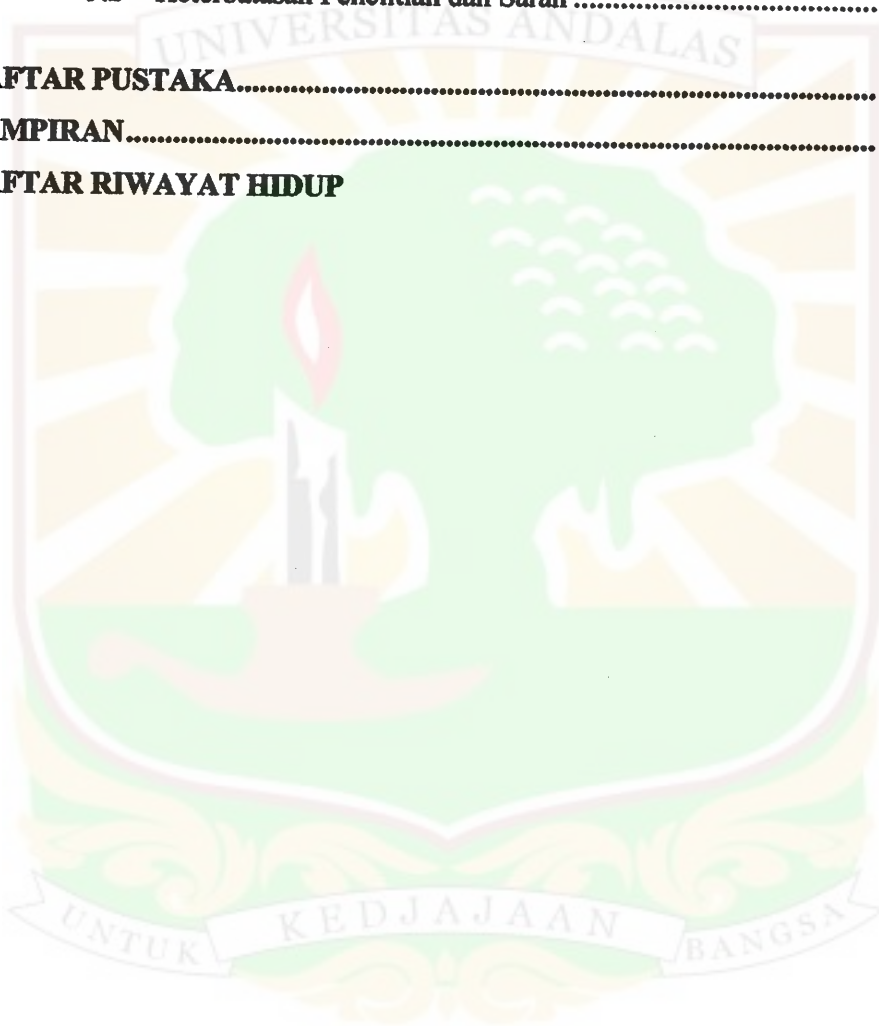
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	42
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran	43

DAFTAR PUSTAKA.....	x
----------------------------	----------

LAMPIRAN.....	44
----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

TABEL

4.1 Analisis Deskriptif.....	29
4.2 Statistik Deskriptif.....	30
4.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	31
4.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	33
4.5 Pengaruh DAU Terhadap Prediksi BD.....	34
4.6 Pengaruh PAD Terhadap Prediksi BD.....	36
4.7 Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Prediksi BD.....	38
4.8 Perbandingan Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Prediksi BD.....	40

GRAFIK

4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	32
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Januari 2001 bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah; kecuali lima bidang; politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama (Brahmantio, 2002). Hal ini menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan (penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, khususnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk.

Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan wewenang tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kota/kabupaten dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas (Brahmantio, 2002). Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah didefinisikan sebagai Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kewenangan untuk mengatur diri sendiri itu luas, nyata dan bertanggung jawab (Abd. Rachim, 2006). Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU-No. 22 tahun 1999.

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (dalam sidik et al, 2002, oleh Maimunah, 2006).

Berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemda. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat.

Di samping itu, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemda (Kesit Bambang, 2004). Namun, pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemda “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Hal ini seperti disebutkan oleh Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002.

Di Indonesia, pada dekade 1990-an, persentase transfer ini mencapai 72% pengeluaran propinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota. Di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah (Fisher, 1996 oleh Kesit Bambang, 2004). Khusus Negara bagian Wisconsin di AS, sebesar 47% pendapatan Pemda berasal dari transfer pempus (Deller et al, 2002 oleh Kesit Bambang, 2004). Di negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran pemda adalah 85% di Afrika Selatan, 67%- 95% di Nigeria, dan 70%- 90% di Meksiko. Dengan adanya transfer dana dari pempus tersebut bagi pemda merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama pemda untuk membiayai belanja daerah. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra. Pada hasil analisis di Pulau Sumatra, diperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *flypaper effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD diterima. Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Aaberge & Langorgen (1997), Andersson (2002), Deller et al (2002), Legrenzi & Milas (2001), Zampelli (1986) dan Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003). (Maimunah, 2006).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi dan 434 kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki karakteristik kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda, sehingga berpengaruh pada berapa besarnya pendapatan ataupun pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut. Keadaan yang berbeda inilah yang membuat penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi Belanja Daerah dan apakah terjadi *flypaper effect* dari pengaruh tersebut khususnya pada Pemda Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Flypaper effect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAU) dibandingkan menggunakan dana sendiri (PAD). *Flypaper effect* ini merupakan pembicaraan utama dalam penelitian ini. Dua sisi yang dapat terjadi pada penelitian ini yaitu terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi Belanja Daerah.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah”**. (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAUt-1) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap prediksi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

1.3 Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Laporan keuangan yang diamati adalah laporan keuangan periode tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
2. Pengaruh Belanja Daerah hanya diukur dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Kabupaten/kota yang diamati adalah sebagian Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Berjumlah 19 kabupaten/kota.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintahan Daerah

Memberikan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

2. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.

3. Bagi Dunia Pendidikan.

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori, akan dibahas lebih jauh mengenai Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah serta kemungkinan terjadinya *flypaper effect*. Menjabarkan teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diperluas dengan referensi atau keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian.

2.1 Belanja Daerah atau Pengeluaran Daerah (*Local Expenditure*)

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. (Abdul Halim, 2002). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari dua komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD.

Dalam rangka perhitungan SAB, anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.1.2. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

1. Belanja langsung yaitu: belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan.

Belanja langsung terdiri dari :

1. **Belanja Pegawai**
2. **Belanja Bunga**
3. **Belanja Subsidi**
4. **Belanja Hibah**
5. **Belanja Bantuan Sosial**
6. **Belanja Bagi Hasil**
7. **Belanja Keuangan**
8. **Belanja tak terduga**

Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

2. **Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.**

Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. **Belanja Pegawai/Personalia**
2. **Belanja Barang/Jasa**

3. Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Keberadaan anggaran belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dan atau tiada suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam perhitungan SAB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran (anggaran tahunan belanja tidak langsung) harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi. Program atau kegiatan investasi yang menambahkan aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena output program atau kegiatan investasi adalah merupakan aset daerah yang dimanfaatkan lebih satu tahun anggaran. Anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk satu tahun anggaran seperti halnya output program atau kegiatan non investasi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Alokasi Belanja (SAB) merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau

kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan. Jumlah belanja menjadi standar untuk mengevaluasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja berdasarkan tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. (Bastian, 2002)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Elita Dewi, dalam jurnalnya yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah: meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public investment*.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

b. Retribusi Daerah

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Disamping itu menurut Kaho, ada beberapa ciri-ciri retribusi yaitu :

1. Retibusi dipungut oleh negara
2. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis
3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan /mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

1. **Retribusi jasa umum, yaitu** : retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. **Retribusi jasa usaha, yaitu** : retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang

bersifat: memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.

Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan mengusai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa: kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.



2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

- a. Dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Prakosa, 2004).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak, juga menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan pemerintah daerah adalah menggali dari PAD.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya PAD. (Brahmantio, 2002).

Berikut formulasi yang digunakan untuk menghitung DAU :

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten/Kota
26% x PDN APBN	10% x 26 % PDN APBN	90% x 26% x PDN APBN

$$\text{DAU suatu Provinsi} = \frac{\text{Bobot provinsi yang bersangkutan}}{\text{Bobot provinsi seluruh indonesia}} * \text{DAU untuk provinsi}$$

$$\text{DAU suatu kabupaten} = \frac{\text{Bobot kabupaten yang bersangkutan}}{\text{Bobot kabupaten di Indonesia}} * \text{DAU untuk kabupaten}$$

Sumber: UU No. 33 Tahun 2004.

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemda, pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pempus diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Namun, pada praktiknya, transfer dari pusat merupakan sumber pendanaan utama pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemda “dilaporkan” di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Hal ini seperti disebutkan oleh Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002.

2.4. Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari pemerintah pusat lebih besar dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. *Flypaper effect* ini merupakan fenomena utama dalam penelitian ini, dimana *flypaper effect* juga dapat disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. (Maimunah, 2006).

Syarat terjadinya *flypaper effect* adalah (1) apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap prediksi Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (2) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

Pada Penelitian Mutiara Maimunah (2006) terjadi *flypaper effect* dalam merespon belanja transfer DAU dan PAD di Pulau Sumatra, ia juga meneliti bahwa *flypaper effect* berpengaruh untuk memprediksi Belanja Daerah periode kedepan dan juga tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra.

Kesit Bambang Prakosa (2004), juga mengadakan penelitian serupa untuk daerah Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya adalah secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

2.5 Review Penelitian Terdahulu

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah baik di Pulau Jawa, Bali, bahkan Sumatra.

Pada hasil analisis di Pulau Jawa, diperoleh hasil yaitu, PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *flypaper effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD diterima. Hasil ini konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, seperti Aaberge & Langorgen (1997).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2006), bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja bidang yang berhubungan langsung dengan publik, yaitu belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah pada belanja daerah sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat/publik juga masih terjadi *flypaper effect* atau tidak. Hasil yang didapat adalah bahwa untuk belanja bidang pendidikan tidak terjadi *flypaper effect*, sedangkan untuk belanja bidang kesehatan dan belanja bidang pekerjaan umum telah terjadi *flypaper effect*.

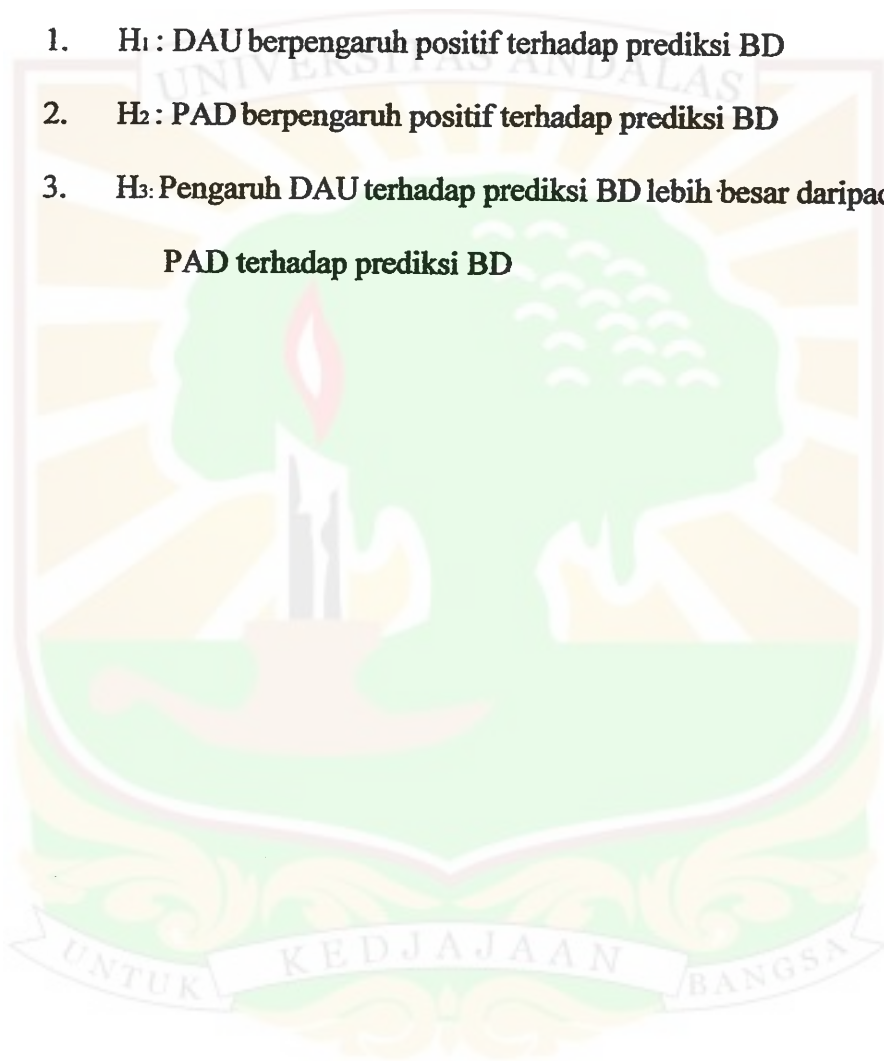
Penelitian lain dilakukan oleh Kesit Bambang (2004), yang melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya menunjukkan bahwa sandaran pemda untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan daripada DAU, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari pempus (salah satunya DAU). (Kesit Bambang, 2004).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Widiyanto (2005), menunjukkan bahwa pengaruh DAU lebih signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini juga menunjukkan terjadinya *flypaper effect*.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan konsep-konsep tersebut diatas, maka hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh DAU terhadap prediksi Belanja Daerah tahun berjalan (BD) untuk Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. H_1 : DAU berpengaruh positif terhadap prediksi BD
2. H_2 : PAD berpengaruh positif terhadap prediksi BD
3. H_3 : Pengaruh DAU terhadap prediksi BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap prediksi BD



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai.

Pada penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu :

- a. Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Berdasarkan definisi di atas, maka yang menjadi variabel independen pada penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah baik Kota maupun Kabupaten di Sumatera Barat.
- b. Variabel Dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini yang merupakan variabel dependen adalah Belanja Daerah.

3.2 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan. Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan data yang sudah

dipublikasikan untuk konsumsi umum oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dan dinas-dinas terkait lainnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.2.1 Data Umum

Indonesia adalah Negara kepulauan yang merupakan campuran dari berbagai macam suku dan budaya. Indonesia terbagi menjadi 33 provinsi dan 434 kabupaten. Dari 33 provinsi tersebut yang dianalisis hanya Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, sehingga berjumlah 19 pemerintahan. Data yang dianalisis selama 5 tahun yaitu tahun 2005-2009.

3.2.2 Data Khusus

Data khusus yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran APBD dari pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang berupa Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Laporan Anggaran Belanja Daerah (BD) dari masing-masing kabupaten/kota yang ada untuk periode yang di teliti.

Sedangkan teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang diambil dari buku-buku, karya tulis, buletin dan data Badan Pusat Statistik Daerah.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara yang memungkinkan kita dapat melihat dari dekat masalah-masalah yang berhubungan dengan pokok bahasan, sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

3.3 Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan ciri-ciri tertentu. Berdasarkan kualitas dan ciri-ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok unit analisis atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah Kota dan Kabupaten yang ada di Sumatera Barat.

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabel- variabel ini tidak ortogonal. *Variabel orthogonal* adalah

variabel independent yang nilai korelasi antar sesama *variable independent* sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam suatu model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel- variabel independent banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel independent.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel- variabel independent. Jika antar variabel independent ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variation inflation factor* (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi berikutnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi seorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar).

Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.4.2 Alat Analisis Statistik

Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regressions*) yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran pemerintah. Regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel terhadap prediksi belanja daerah secara terpisah, sedangkan regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel tersebut secara serentak.

Regresi sederhana dan berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan di bawah ini dalam bentuk persamaan-persamaan, yaitu:

Pengujian Hipotesis 1 (H1) digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap prediksi Belanja Daerah.

$$H_1: Y_i = a + b_1 DAU_{i-1} + e$$

Notasi :

Y_i = Jumlah Belanja (BDt)

a = Konstanta

b_1 = koefisien regresi

DAU_{i-1} = Jumlah DAU-1

E = error term

Pengujian Hipotesis 2 (H2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah.

$$H2: Y_i = a + b_2 PAD_{2i} + e$$

Notasi:

b_2 = koefisien regresi

PAD_{2i} = Jumlah PAD_{t-1}

Pengujian Hipotesis 3 (H3) adalah untuk mengetahui apakah pengaruh DAU terhadap prediksi BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap prediksi BD. Serta keterkaitan adanya *flypaper effect* pada pengaruh tersebut.

$$H3: Y_i = a + b_1 DAU_{1i} + b_2 PAD_{2i} + e$$

Untuk menguji hipotesis 1 sampai hipotesis 3 digunakan *statistic inferensi* uji t. Caranya dengan melihat data DAU dan PAD tahun yang bersangkutan. Uji t- test ini sendiri dilakukan menggunakan program aplikasi komputer *SPSS 13.00 For Window*. Apabila hubungannya positif maka pengaruhnya akan semakin signifikan.

Untuk melihat apakah terjadi *flypaper effect*, maka efek DAU terhadap prediksi BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap prediksi BD. Dalam

regresi tunggal, koefisien regresi, nilai *t*-statistic, *R*, *R*², dan *adjusted R*² masing-masing variabel (regresi) dibandingkan antara DAU dan PAD. Untuk regresi berganda, dibandingkan koefisien regresi untuk masing-masing variabel.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil analisis yang diperoleh secara rinci disertai dengan langkah-langkah analisis data yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem SPSS.

4.1 Analisis Deskriptif

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau abnormal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis dan skewness. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Statistics

		Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009	Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2005 s.d 2009	Realisasi Belanja Daerah tahun 2005 s.d 2009
N	Valid	19	19	19
	Missing	0	0	0
Skewness		1.456	3.855	1.252
Std. error of Skewness		.524	.524	.524
Kurtosis		2.583	15.907	1.578
Std. error of Kurtosis		1.014	1.014	1.014

Untuk melihat distribusi data dengan mengetahui nilai Skewness dan standar errornya, bila nilai Skewness dibagi standar errornya menghasilkan angka $\leq 2,00$ maka distribusinya normal. Realisasi dana alokasi umum skewness bagi standar errornya ($1,456/0,524= 2,78$), realisasi pendapatan daerah ($3,855/0,524=7,35$) realisasi belanja daerah ($1,252/0,524=2,38$). Pada hasil penelitian terlihat datanya tidak berdistribusi dengan normal.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Terendah	Tertinggi
Realisasi Dana Alokasi Umum	19	946555,7	842535,1	537697,6	1981310
Realisasi Pendapatan Daerah	19	85385,37	64635,37	34454,96	412607,3
Realisasi Belanja Daerah	19	1257215	1060604	687819,4	2696553

Catatan : Angka dinyatakan dalam jutaan rupiah

Berdasarkan tabel 4.2 diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi dana alokasi umum 946555.7, median 842535,1. Nilai terendah yaitu 537697,6 dan yang tertinggi 1981310. Rata-rata realisasi pendapatan daerah 85385.37, median 64635,37. Nilai terendah yaitu 34454,96 dan yang tertinggi 412607,3. Rata-rata realisasi belanja daerah 1257215, median 1060604. Nilai terendah yaitu 687819,4 dan yang tertinggi 2696553.

4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis terhadap multikolinieritas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-21377.3	137226.2		-.156	.878		
Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009	1.324	.173	.906	7.638	.000	.595	1.680
Realisasi Pendapatan Tahun Daerah Tahun 2009	884.597	2813.688	.037	.314	.757	.595	1.680

a. Dependent Variable : Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independent yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independent yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independent yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi.

2. Uji Heteroskedasticitas

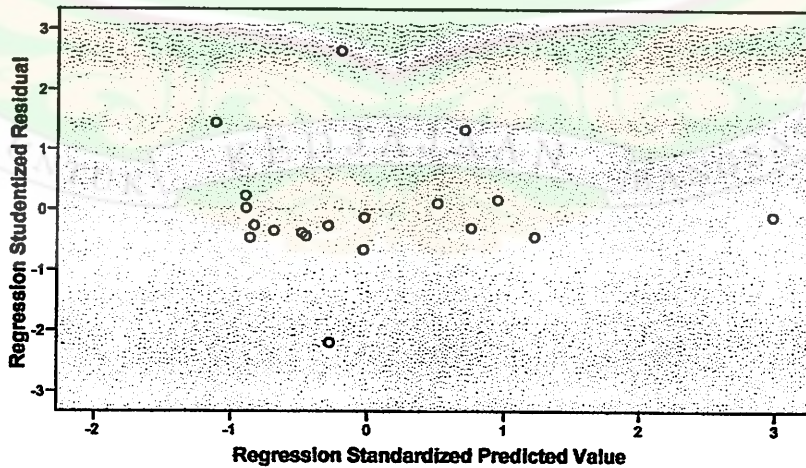
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*. Bila titik tebaran tidak berpola tertentu dan menyebar merata disekitar garis titik nol maka dapat disebut varian homogen pada setiap nilai X dengan demikian asumsi homokedastisitas terpenuhi. Hasil analisis uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam grafik 4.1

Grafik 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009



Dari grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Belanja Daerah (BD) berdasarkan masukan variabel independent Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji Durbin-Watson dapat digunakan untuk menguji autokorelasi. Tabel 4.4 menunjukkan hasil analisis uji autokorelasi.

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimate	Durbin-Watson
1	.931 ^a	.866	.849	202680.102	1.217

a. Predictors: (Constant), Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009, Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2005 s.d 2009

b. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

Angka Durbin-Watson menunjukkan 1.217 yang berarti masih berada pada batas normal yaitu antara -2 sampai dengan 2. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Analisis Hasil Regresi

a. Regresi Sederhana: Pengaruh DAU Terhadap Prediksi Belanja Daerah

Pengujian untuk melihat apakah DAU dapat memprediksi BD dilakukan dengan model regresi. Dari nilai r tampak bahwa DAU mempunyai hubungan yang kuat secara signifikan positif terhadap BD yaitu sebesar 0,93 pada alpha 5%. Untuk analisis regresi sederhana untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perubahan DAU terhadap BD, hasil analisisnya dapat dilihat dalam tabel 4.5

Tabel 4.5

Pengaruh DAU Terhadap Prediksi BD

Prediksi belanja daerah = - 29271,2 + 1,359 (realisasi dana alokasi umum)
Sig. = 0.0005 t- statistic = 10.439
F-satistic = 108.906
$R^2 (R^2) = 0.930 (0.865)$
Adjusted-R = 0.857

Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai t-statistic, R, dan R^2 , hasilnya menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk regresi sederhana adalah 10.439.

Nilai R yang positif (0,930) menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan berpola positif diantara kedua variabel. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif antara DAU terhadap BD. Adapun besarnya pengaruh perubahan BD yang disebabkan oleh perubahan DAU ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu 0.865 atau 86,5 %, yang bermakna bahwa 86,5 % DAU dapat mempengaruhi variable BD. Hasil persamaan regresi yaitu :

Prediksi belanja daerah = - 29271,2 + 1,359 (dana alokasi umum)

Dari nilai $b = 1,359$ berarti bahwa variabel belanja daerah akan bertambah sebesar 1,359 juta bila dana alokasi umum bertambah setiap satu juta.

Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap prediksi BD tidak dapat ditolak. Artinya, jika ada peningkatan jumlah DAU, maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah belanja (BD) yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah (2006) & Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003).

b. Regresi Sederhana: Pengaruh PAD Terhadap Prediksi Belanja Daerah

Cara yang sama dilakukan pula pada model regresi kedua yaitu meregres PAD dengan BD untuk menguji hipotesis dua (H_2) yang berbunyi PAD berpengaruh positif terhadap prediksi BD. Dari nilai r tampak bahwa

PAD mempunyai hubungan yang kuat secara signifikan positif terhadap BD yaitu sebesar 0,683 pada alpha 5%.

Analisis regresi sederhana untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh PAD terhadap BD, hasil analisisnya dapat dilihat dalam tabel 4.6

Tabel 4.6
Pengaruh PAD Terhadap Prediksi BD

Prediksi belanja daerah = $887117,5 + 4,334$ (pendapatan daerah)
Sig. = 0.0005 t- statistic = 3.858
F-satistic = 14.887
$R (R^2) = 0.683 (0.467)$
Adjusted-R = 0.436

Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai t-statistic, R, dan R^2 , hasilnya menunjukkan bahwa nilai t-statistic untuk regresi sederhana adalah 3.858. Nilai R yang positif (0,683) menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola positif diantara kedua variabel. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif antara PAD terhadap BD. Adapun besarnya pengaruh perubahan BD yang disebabkan oleh perubahan PAD ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu 0.467 atau 46,7 %, yang bermakna bahwa 46,7 % PAD dapat mempengaruhi variable BD. Hasil persamaan regresi yaitu :

Prediksi belanja daerah = $887117,5 + 4,334$ (pendapatan daerah)

Dari nilai $b = 4,334$ berarti bahwa variabel belanja daerah akan bertambah sebesar 4,334 juta bila dana pendapatan asli daerah (PAD) bertambah setiap satu juta.

Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap prediksi BD tidak dapat ditolak. Artinya, jika ada peningkatan jumlah PAD maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah belanja daerah (BD) yang akan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Maimunah (2006) & Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003).

Dari hasil kedua regresi sederhana diatas, menunjukkan bahwa meskipun kedua variabel secara signifikan dapat mempengaruhi BD_t , namun daya prediksi DAU ternyata lebih baik daripada PAD. Koefisien regresi DAU adalah 1.359 dan PAD adalah 4,334. Nilai t-statistic dan F-statistic DAU lebih tinggi dari PAD (t-statistic DAU: 10.439, PAD: 3.858 dan F-statistic DAU: 108.906, PAD: 14.887). Begitu pula untuk nilai R^2 dan Adjusted R^2 , dimana DAU_{t-1} lebih tinggi daripada PAD_{t-1} . Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan regresi, DAU dapat memprediksi BD lebih baik daripada PAD. Secara sederhana hal ini bermakna adanya *flypaper effect*, yaitu respon pemda terhadap perubahan DAU lebih besar daripada terhadap perubahan PAD.

c. Regresi Berganda: Pengaruh DAU dan PAD terhadap Prediksi BD

Pengujian atas pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah (BD) dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja daerah dan untuk mengetahui yang mana yang lebih dominan diantara kedua variabel tersebut. Tabel dibawah ini merupakan hasil analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap BD secara bersamaan.

Tabel 4.7

Pengaruh DAU dan PAD terhadap Prediksi BD

Belanja daerah = - 29271,2 + 1,359 dana alokasi umum
Sig. = 0.0005 t- statistic = 10.439
$R^2 = 0.931$ (0.865)
Adjusted-R = 0.849

Setelah dilakukan pengolahan data dengan uji regresi berganda, maka prinsip permodelan harus yang sederhana variabelnya sehingga masing-masing variabel indepeden perlu di cek nilai p valuenya, variabel yang p valuenya $> 0,05$ dikeluarkan dari model. Ternyata dari 2 variabel indepeden (pada kolom sig di kotak Coefficients) ada variabel yang p valuenya $> 0,05$, yaitu realisasi pendapatan daerah $p=0,721$, sedangkan variabel realisasi dana alokasi umum p value = 0,0005. Tahap berikutnya mengeluarkan variabel

yang p valuenya $> 0,05$. Dengan demikian variabel yang dikeluarkan dari permodelan regresi berganda adalah realisasi pendapatan daerah.

Hasil analisis regresi berganda yang terlihat pada tabel diatas menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif, perubahan DAU terhadap BD yang ditunjukkan dengan nilai t-statistic dari variabel bebas yaitu sebesar 10.439 untuk DAU . Nilai R yang positif (0,931) yang menunjukkan hubungan yang positif diantara kedua variabel. Adapun besarnya pengaruh perubahan BD yang disebabkan oleh perubahan DAU ditunjukkan oleh nilai R^2 yaitu sebesar 86,5 % yang bermakna bahwa 86,5 % DAU dapat mempengaruhi variable BD, Hasil persamaan regresi yang diperoleh yaitu :

$$\text{Belanja daerah} = - 29271,2 + 1,359 \text{ dana alokasi umum}$$

Dari nilai $b= 1,359$ berarti bahwa variabel belanja daerah akan bertambah sebesar 1,359 juta bila dana alokasi umum (DAU) bertambah setiap satu juta.

4.4 Pengujian Terhadap Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan lebih banyak atau lebih boros dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat (DAU) dibandingkan menggunakan dana sendiri (PAD). Untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect*, maka efek DAU_{t-1} terhadap BD_t dibandingkan dengan efek PAD_{t-1} terhadap BD_t .

Dalam regresi tunggal, koefisien regresi, nilai t-statistic, F-statistic, R, R², dan Adjusted R² masing-masing variabel (regresi) dibandingkan antara DAU dan PAD. Apabila efek yang ditimbulkan oleh perubahan DAU terhadap BD lebih besar daripada efek yang ditimbulkan PAD terhadap BD maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

Perbandingan masing-masing variabel (regresi) untuk regresi sederhana dengan lag dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.8

Perbandingan Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Prediksi BD

No	Variabel	DAU	PAD
1	Persamaan regresi	BD = - 29271,2 + 1,359 (DAU)	BD = 887117,5 + 4,334 (PAD)
2	Sig	0.0005	0.0005
3	t- statistic	10.439	3.858
	F statistic	108.906	14.887
4	R (R ²)	0.930 (0.865)	0.683 (0.467)
5	Adjusted-R	0.857	0.436

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t-statistic, F-statistic, R, R², dan adjusted R² masing-masing variabel (regresi) bahwa DAU lebih besar daripada PAD, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap prediksi Belanja Daerah (BD) lebih besar daripada pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (BD) yang berarti juga bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap prediksi BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap prediksi BD tidak dapat ditolak. Hasil ini konsisten dengan pandangan Mutiara Maimunah (2006), dan analisis yang dilakukan oleh Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2003).

Dari hasil regresi diatas dapat dilihat bahwa DAU dan PAD benar-benar memberikan pengaruh terhadap BD bahkan pada saat DAU dan PAD diregresi secara serempak hasilnya juga menunjukkan adanya pengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) dan dari hasil perbandingan yang menunjukkan bahwa nilai t-statistic, F-statistic, R, R^2 , dan adjusted R^2 masing-masing variabel (regresi) dari DAU yang lebih besar dari PAD terlihat bahwa pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD dan memberikan bukti tentang keberadaan *flypaper effect*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Seperti yang telah dijabarkan pada bab- bab sebelumnya bahwa penelitian ini menganalisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran atau belanja daerah di Sumatera Barat dengan mengambil sampel pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang dipilih secara acak. Belanja daerah adalah jumlah total pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran yang terdapat dalam Laporan APBD.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada beberapa kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama adalah diterima, artinya dana alokasi umum dengan *lag* 1 tahun (DAU_{t-1}) mempengaruhi besarnya prediksi belanja daerah (BD_t).
2. Hasil pengujian hipotesis kedua juga diterima, artinya pendapatan asli daerah dengan *lag* 1 tahun (PAD_{t-1}) mempengaruhi besarnya prediksi belanja daerah (BD_t).
3. Apabila dilakukan pengujian secara serentak tampak bahwa pengaruh DAU_{t-1} lebih kuat daripada pengaruh PAD_{t-1} , hal tersebut membuktikan bahwa terjadi *flypaper*

effect pada belanja daerah di Indonesia, dengan demikian hipotesis ketiga juga diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian- penelitian berikutnya, yang mungkin masih terdapat variabel-variabel lain yang merupakan faktor penting dalam manajemen keuangan dan penganggaran daerah. Keterbatasan- keterbatasan studi ini adalah:

1. Hanya meneliti Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat dan periodenya hanya 5 tahun yaitu tahun 2005-2009, untuk penelitian berikutnya agar menggunakan sampel yang lebih banyak dengan periode yang lebih panjang agar penelitian lebih obyektif.
2. Studi ini tidak menganalisis lebih jauh efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran (misalnya tidak mempertimbangkan jumlah, struktur usia, dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk). Sehingga tidak dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor pemoderasi dan kontinjensi. Studi mendatang dapat memasukkan faktor-faktor ini.

Seperti yang telah dikemukakan pada kesimpulan diatas bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tertarik dan berkecimpung dengan masalah anggaran, yang dalam hal ini adalah APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah; Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159. Surabaya 16-17 Oktober 2003
- Aziz, Nasir. *Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Perencanaan dan Penganggaran)*. Seminar Pengelolaan Keuangan Publik. Nanggroe Aceh Darussalam. 31 Januari 2007.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, *Laporan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005-2009*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, *Laporan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2005-2009*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, *Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2005-2009*.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta. 2006
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. ed Ketiga. BP UNDIP, Semarang, 2005.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta. 2002.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah*. ed Revisi. Salemba Empat. Jakarta. 2004.
- Isdijoso, Brahmantio. *Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus; Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*, Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1, 2002.
- Maimunah, Mutiara. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra*, Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang 23-26 Agustus 2006.

Prakosa, Kesit Bambang. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (studi empiric di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2. 2004. xvi.

Rachim, Abdul AF. *Pengaruh Struktur Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kota Terhadap Kemandirian Wilayah Dan Perkembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Samarinda*, PhD Theses dari JIPTUNAIR, 2006. <http://adln.lib.unair.ac.id/go>.

Sulistiyawan, Eko. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra*.



Lampiran 1

LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH T.A 2005-2009

Kabupaten, Kota di Sumatera Barat

(dalam rupiah)

No	Nama Daerah	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Kepulauan Mentawai	145.752.238.000	265.247.290.975	241.349.405.748	35.090.943.430	379.558.791.000
2	Kab. Pesisir Selatan	271.340.573.205	392.517.880.132	496.544.970.000	612.101.361.200	614.032.229.000
3	Kab. Solok	221.711.779.300	325.109.704.081	474.783.830.648	499.483.051.873	484.951.017.000
4	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	165.529.155.860	231.624.421.083	295.041.143.041	367.988.992.588	420.620.897.000
5	Kab. Tanah Datar	418.538.013.572	362.114.753.990	452.694.751.000	620.664.949.650	556.304.351.000
6	Kab. Padang Pariaman	262.212.965.945	339.566.722.127	462.283.771.000	613.087.144.907	636.459.461.000
7	Kab. Agam	255.891.662.903	189.946.025.991	725.743.685.529	575.083.418.347	616.450.983.000
8	Kab. Lima Puluh Kota	218.347.737.619	318.956.058.000	435.607.658.000	594.294.975.000	549.340.198.000
9	Kab. Pasaman	171.617.321.185	278.771.830.768	357.729.088.002	409.028.664.924	446.743.281.000
10	Kab. Solok Selatan	78.284.144.903	219.301.448.137	261.800.347.636	304.679.097.730	362.989.328.000
11	Kab. Dharmasraya	100.727.371.000	193.613.012.000	298.143.527.000	388.452.586.558	441.052.949.000
12	Kab. Pasaman Barat	127.490.701.882	259.445.480.696	322.914.650.693	399.205.568.200	482.704.307.000
13	Kota Padang	459.085.597.214	614.440.064.378	740.303.254.460	881.727.534.950	996.768.308.000
14	Kota Solok	112.146.628.992	170.079.333.104	230.724.463.000	288.479.637.710	300.849.863.000
15	Kota Sawahlunto	129.746.259.000	191.842.036.000	227.380.030.000	278.259.409.000	278.821.484.000
16	Kota Padang Panjang	131.275.438.000	170.959.550.893	196.536.429.000	248.443.303.000	278.779.884.000
17	Kota Bukittinggi	157.118.503.927	224.543.362.613	278.952.128.714	290.388.279.114	346.690.784.000
18	Kota Payakumbuh	164.147.537.600	216.424.889.030	259.622.618.580	305.317.473.023	356.247.339.000
19	Kota Pariaman	127.630.066.475	212.545.963.447	246.528.854.455	266.139.064.315	282.992.195.000

Lampiran 2

LAPORAN REALISASI DANA ALOKASI UMUM T.A 2005-2009

Kabupaten, Kota di Sumatera Barat

(dalam rupiah)

No	Nama Daerah	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Kepulauan Mentawai	148.218.243.000	184.682.000.000	236.058.000.000	273.300.163.000	276.648.811.000
2	Kab. Pesisir Selatan	250.106.823.754	344.709.000.000	380.657.000.000	424.760.863.000	448.604.300.000
3	Kab. Solok	151.940.000.000	293.117.000.000	325.791.000.000	365.383.071.000	368.844.815.000
4	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	107.707.000.000	214.370.000.000	243.480.000.000	273.785.923.000	279.405.725.000
5	Kab. Tanah Datar	182.326.000.000	302.633.000.000	337.755.475.000	373.848.936.000	379.899.210.000
6	Kab. Padang Pariaman	197.236.000.000	320.791.999.992	355.818.875.000	407.306.200	417.424.879.000
7	Kab. Agam	204.252.000.000	338.577.000.000	337.132.000.000	414.880.748.000	418.752.290.000
8	Kab. Lima Puluh Kota	190.927.545.910	311.994.000.000	344.547.000.000	385.019.188.000	391.553.317.000
9	Kab. Pasaman	150.447.376.777	232.044.000.000	263.891.000.000	297.522.370.000	318.683.509.000
10	Kab. Solok Selatan	56.065.200.000	169.952.000.000	188.488.000.000	213.109.223.000	221.532.005.000
11	Kab. Dharmasraya	94.232.405.000	196.311.000.000	219.740.237.000	27.157.819.083	256.120.434.000
12	Kab. Pasaman Barat	116.815.640.100	243.281.000.000	271.069.000.000	305.576.071.000	323.123.275.000
13	Kota Padang	287.033.000.000	503.906.000.000	565.100.000.000	624.642.086.000	628.472.618.000
14	Kota Solok	94.643.000.000	160.647.000.000	182.247.000.000	205.820.702.000	205.832.370.000
15	Kota Sawahlunto	115.677.186.000	147.638.000.000	168.418.962.000	187.631.256.000	190.325.971.000
16	Kota Padang Panjang	117.705.273.000	152.317.000.000	170.405.462.000	192.699.288.000	194.866.985.000
17	Kota Bukittinggi	140.457.618.983	183.130.000.000	211.433.000.000	236.403.814.000	236.106.157.000
18	Kota Payakumbuh	144.320.723.284	180.808.000.000	205.435.000.000	234.690.661.000	237.487.541.000
19	Kota Pariaman	114.173.218.197	170.463.000.000	195.587.797.200	223.192.122.400	222.473.796.000

Lampiran 3

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) T.A 2005-2009

Kabupaten, Kota di Sumatera Barat

(dalam rupiah)

No	Nama Daerah	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Kepulauan Mentawai	8.627.026.000	15.815.144.707	19.882.615.411	25.243.861.231	29.188.116.000
2	Kab. Pesisir Selatan	8.464.998.039	12.156.109.823	12.144.501.300	16.377.994.100	17.514.448.000
3	Kab. Solok	11.888.140.089	15.093.634.185	15.964.852.295	18.373.100.528	19.806.290.000
4	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	25.571.615.990	15.878.957.658	21.145.798.734	24.423.791.385	25.982.270.000
5	Kab. Tanah Datar	22.745.199.700	27.681.518.130	30.062.449.000	32.084.222.307	36.543.147.000
6	Kab. Padang Pariaman	9.710.516.407	12.852.540.416	16.678.021.000	23.813.876.726	22.880.889.000
7	Kab. Agam	11.275.693.385	17.292.119.797	22.230.476.970	24.180.990.518	25.956.304.000
8	Kab. Lima Puluh Kota	9.416.806.561	16.786.416.000	17.681.904.000	20.738.935.000	11.307.396.000
9	Kab. Pasaman	7.155.223.721	11.978.314.912	16.265.941.034	16.265.565.714	15.721.240.000
10	Kab. Solok Selatan	5.375.883.424	6.620.953.170	10.437.793.800	12.008.338.900	11.989.380.000
11	Kab. Dharmasraya	5.366.831.000	12.295.905.000	17.404.345.000	21.562.523.640	25.120.058.000
12	Kab. Pasaman Barat	6.525.205.784	14.294.569.561	19.599.535.902	19.755.964.900	23.457.517.000
13	Kota Padang	89.747.733.279	98.546.198.285	106.471.167.860	117.728.886.783	113.318.411.000
14	Kota Solok	10.083.358.900	17.384.291.311	18.668.908.000	21.644.596.840	23.831.125.000
15	Kota Sawahlunto	12.804.881.000	16.378.340.000	21.311.258.000	23.441.989.000	26.532.986.000
16	Kota Padang Panjang	7.220.423.000	9.349.808.568	10.950.767.000	13.457.506.000	22.581.303.000
17	Kota Bukittinggi	19.320.632.546	24.397.363.460	26.896.480.144	33.828.542.850	38.891.935.000
18	Kota Payakumbuh	20.415.811.336	23.100.066.820	26.976.095.480	31.491.006.057	32.555.381.000
19	Kota Pariaman	5.162.539.998	7.318.101.602	9.151.252.366	13.341.784.172	12.263.181.000

LAMPIRAN 4

Statistik Deskriptif

Statistics

		Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005 s.d 2009	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009
N	Valid	19	19	19
	Missing	0	0	0
Skewness		1.456	3.855	1.252
Std. Error of Skewness		.524	.524	.524
Kurtosis		2.583	15.907	1.578
Std. Error of Kurtosis		1.014	1.014	1.014



LAMPIRAN 5

UJI ASUMSI KLASIK

1. Multikolinieiritas

Coefficients

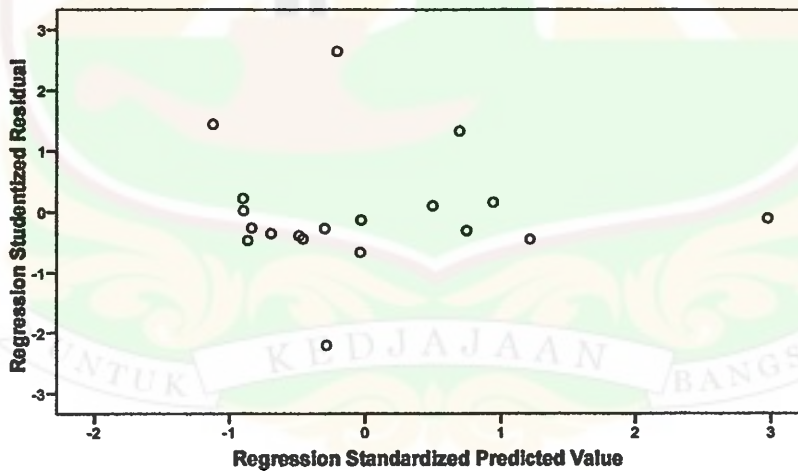
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21377.3	37226.2		-.156	.878		
	Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009	1.324	.173	.906	7.638	.000	.595	1.680
	Realisasi Pendapa Daerah Tahun 200	884.597	813.688	.037	.314	.757	.595	1.680

a. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

2. Heteroskedastisitas

Scatterplot

Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009



3. Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.931 ^a	.866	.849	202680.102	1.217

a. Predictors: (Constant), Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009, Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009

b. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009



LAMPIRAN 6

Hasil Uji hipotesis.

1. DAUt-1 mempengaruhi BD (parsial)

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.930 ^a	.865	.857	197234.991

a. Predictors: (Constant), Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009

b. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.2E+012	1	4.239E+012	108.968	.000 ^a
	Residual	6.6E+011	17	3.890E+010		
	Total	4.9E+012	18			

a. Predictors: (Constant), Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009

b. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-29271.2	131285.1		-.223	.826
	Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009	1.359	.130	.930		

a. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

LAMPIRAN 7

2. PADt-1 mempengaruhi BD_t (parsial)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.467	.436	392020.547

a. Predictors: (Constant), Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005 s.d 2009

b. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.3E+012	1	2.288E+012	14.887	.001 ^a
	Residual	2.6E+012	17	1.537E+011		
	Total	4.9E+012	18			

a. Predictors: (Constant), Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005 s.d 2009

b. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

Coefficients^b

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	87117.5	31488.8		6.747	.000
	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005 s.d 2009	4.334	1.123	.683		

a. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

LAMPIRAN 8

3. DAUt-1 dan PADt-1 mempengaruhi BD_t (serentak)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.931 ^a	.866	.849	202472.550

a. Predictors: (Constant), Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005 s.d 2009, Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.2E+012	2	2.122E+012	51.768	.000 ^a
	Residual	6.6E+011	16	4.100E+010		
	Total	4.9E+012	18			

a. Predictors: (Constant), Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005 s.d 2009, Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009

b. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3548.574	148355.5		-.058	.954
	Realisasi dana alokasi umum tahun 2005 s.d 2009	1.310	.190	.897	6.909	.000
	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005 s.d 2009	.299	.823	.047	.363	.721

a. Dependent Variable: Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005 s.d 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI:

Nama : Sri Yulia Rahmi
Tempat / Tanggal Lahir : Koto Tuo / 10 November 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Kawin
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Mela Sentosa No. B2 Padang

PENDIDIKAN FORMAL:

1. Pendidikan SDN 04 Canduang (1989 - 1995)
2. Pendidikan SMPN 1 Canduang (1995 - 1998)
3. Pendidikan SMAN I IV Angkat Canduang (1998 - 2001)
4. DIII Jurusan Keuangan Perbankan Fakultas
Ekonomi Universitas Andalas (2002 - 2006)
5. S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Reguler Mandiri Universitas Andalas (2007 - 2012)

Padang, Agustus 2012

(Sri Yulia Rahmi)